

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, F. (2021). Aplikasi Bukti Potong Elektronik (e-bupot) Sebagai Bentuk Kemudahan Administrasi Bagi Pemotong Pajak. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 4(1).
- Dahlan, A. M. (2021). Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan, dan Kontrol Perilaku terhadap Penggunaan e-Bupot 23/26 pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara. (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Georgeus dan Dedi. 2006. *Cermat Mengenal Seluk Beluk Perpajakan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Karina, M., & Simanjuntak, B. H. (2022). Pengaruh Efektivitas Penggunaan e-Bupot 23/26. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 22(1), 157-170.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. “APBN 2020 Akselerasi Daya Saing Melalui Inovasi Dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia”, <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>, diakses pada tanggal 07 Desember2020 pukul 14.11.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP178/PJ/2017 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 04/PJ/2017
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ /2017
- Maulida, R. 2020. “Aplikasi e-Bupot OnlinePajak & Cara Membuat Bukti Potong”,<https://www.online-pajak.com/tips-bukti-potong/mengenal-e-bupotonlinepajak>, diakses pada 20 Desember2021
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat

Jenderal Pajak

- Sandford, Cedric. 1989. Administrative and Tax Compliance Costs of Taxation. Dalam Cedric Sandford, (ed.). Administrative and Tax Compliance Costs of Taxation (Rotterdam, Netherland: Kluwer Law and Taxation Publisher
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak*. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana.